

**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS  
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)  
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

**RASYIDAH MUSTIKA**  
06 096 043



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**





Nomor Alumni Universitas	<b>Rasyidah Mustika</b>	Nomor Alumni Fakultas
--------------------------	-------------------------	-----------------------

a). Tempat/Tgl.lahir: Padang, 29/06/1988 b). Nama Orang Tua: Mustafa Zen S.IP M.Pd dan Dra. Asni Juwita c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096043 f). Tgl.Lulus: 3 November 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,41 i) Lama Studi : 35 bulan k) Alamat orang tua: Jln. Pahlawan No.52.Kampung Jawa Pariaman

**Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah**

Tugas Akhir D IV oleh Rasyidah Mustika.  
Pembimbing 1. Novrina Candra, SE. MM. Ak, 2. Amy Fontanella, SE. Ak

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman sebelum dan sesudah pemekaran daerah tahun anggaran 2000-2003 dan 2004-2007. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat kemandirian dan rasio efektivitas keuangan. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) Tingkat kemandirian Kabupaten Padang Pariaman masih sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, daerah belum mampu melaksanakan otonomi keuangan daerah seperti yang diamanatkan dalam UU.No.32 tahun 2004 terkait Otonomi Daerah. 2) Efektivitas keuangan Kabupaten Padang Pariaman pada masa sebelum pemekaran daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan masa sesudah pemekaran. 3) Rasio efektifitas pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman rata-rata sebesar 101,88. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintahan daerah yang baik, karena target yang ingin dicapai setiap tahunnya mampu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 November 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Desi Handayani, SE.Ak	Afridian Wirahadi, SE. Ak	Ferdawati, SE.MSc.Ak	Novrina Candra, SE,MM. Ak

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE. MM. Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pasca keluarnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.34 tahun 2004, memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pasca otda perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Pada dasarnya sumber – sumber penerimaan diantara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam, misalnya saja ada daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah lainnya yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Salah satu dampak yang muncul pasca keluarnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah adalah terbentuknya daerah-daerah baru sebagai akibat dari terjadinya pemekaran wilayah. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang mengalami pemekaran, dimana sebelumnya Kota Administratif(Kotif) Pariaman merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya terjadi peningkatan status menjadi Kota Pariaman sebagai sebuah daerah baru dengan keluarnya Undang-Undang No 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat.



Konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah tidak dikenal lagi istilah Kota Administratif (Kotif) sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) bahwa Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Bertolak dari keluarnya Undang-Undang di atas menjadi alasan utama dilakukannya pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman. Tidak ada lagi istilah Kotif di Indonesia membuat masyarakat yang berada di Kotif Pariaman mesti mengambil sikap, antara membubarkan Kotif Pariaman atau meningkatkan statusnya menjadi Kota Pariaman. Akhirnya dengan segenap perjuangan, ditetapkanlah peningkatan status Kotif Pariaman menjadi Kota Pariaman.

Terbentuknya daerah baru pasca pemekaran daerah pada tanggal 5 Juni 2002 secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian dan sumber – sumber pendapatan bagi daerah induknya. Daerah yang baru terbentuk akan menerima sebagian aset dari wilayah induknya untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintahan Propinsi/Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk”.

Akibat penyerahan aset sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendagri di atas menyebabkan berkurangnya aset dan sumber-sumber pendapatan wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan persetujuan Bupati Padang Pariaman dalam telaah staf Kepala BPKD Padang Pariaman tanggal 11 Januari 2004, menyebutkan bahwa

penyerahan aset dari Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman baru dimulai pada tahun 2004, seperti penyerahan rumah sakit, terminal dan pasar. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan Kabupaten Padang Pariaman sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran daerah tahun 2000-2003 dan 2004-2007.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan daerah untuk mengatur keuangan di daerah tersebut, sehingga daerah tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah pusat. Akan tetapi daerah mampu mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan agar daerah tersebut mampu membangun daerahnya serta mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis kinerja keuangan pemerintah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Ciri utama suatu daerah otonom yang mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Adapun salah satu tolak ukurnya adalah semakin kecil tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dan semakin besar PAD yang mampu diperoleh suatu daerah maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan telah



otonom. Oleh karena itu sudah sewajarnya PAD dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100 %. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan, hal tersebut dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi,2007).

Kemandirian suatu daerah tidak selalu mempengaruhi tingkat efektivitas daerah tersebut. Ketika suatu daerah dikatakan telah mandiri, belum tentu daerah tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik juga. Hal ini disebabkan karena suatu daerah memiliki target PAD yang tinggi sedangkan kemampuannya sumberdaya mereka tidak mencukupi, akibatnya terjadi ketidaktercapaian target sehingga daerah tersebut dikatakan belum efektif dalam mengelola keuangan daerah. Begitu juga sebaliknya, suatu daerah yang efektivitas keuangannya sudah cukup baik atau di atas 100%, belum tentu bisa dikatakan daerah tersebut telah mandiri, ketika penerimaan daerahnya banyak bersumber dari pendapatan lain diluar PAD seperti bantuan dari pemerintah pusat dan lain sebagainya.

Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Padang Pariaman ini, diharapkan tidak menurunkan tingkat kemandirian dan efektivitas daerah induknya. Seperti diketahui, ketika sudah terbentuk daerah baru, aset-aset yang berada dilokasi terbentuknya wilayah baru tersebut mesti diserahkan atau dilepaskan dari daerah induknya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pemasukan PAD untuk daerah induk

pasca pemekaran, akibatnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mesti mengambil langkah-langkah terkait pengoptimalan sumber-sumber produksi yang nantinya dapat meningkatkan PAD daerah itu sendiri. Salah satu hasil bumi yang dapat dioptimalkan misalnya di bidang perkebunan, antar lain kakao, sawit, dan sebagainya.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun dari data tersebut belum diketahui apakah peningkatan ini sudah menggambarkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Bedasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan Kabupaten Padang Pariaman sebelum dan sesudah pemekaran. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Analisis Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah”**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimanakah tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Padang Pariaman sebelum dan sesudah pemekaran daerah tahun anggaran 2000-2003 dan 2004-2007

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemandirian Kabupaten Padang Pariaman pada masa sebelum pemekaran daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan masa sesudah pemekaran daerah, sebelum pemekaran rata-rata tingkat kemandirian adalah 3,31%, sedangkan rata-rata tingkat kemandirian sesudah pemekaran adalah 3,47%
2. Tingkat kemandirian Kabupaten Padang Pariaman masih sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, daerah belum mampu melaksanakan otonomi keuangan daerah seperti yang diamanatkan dalam UU.No.32 tahun 2004 terkait Otonomi Daerah
3. Sebelum pemekaran tingkat kemandirian Padang Pariaman memiliki grafik naik, dari pengamatan 4 tahun terakhir, tingkat kemandirian terus meningkat, berbeda dengan sesudah pemekaran meskipun rata-rata tingkat kemandirian sedikit meningkat, akan tetapi pada perkembangannya mengalami grafik turun, dari tahun ke tahun tingkat kemandirian terus mengalami penurunan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2000*.
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2001*
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2002*
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2003*
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2004*
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2005*
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2006*
- BPS. *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka tahun 2007*
- Dwirandra. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006* . Skripsi. Jurusan Akuntansi,FE, Universitas Udayana.
- Halim, Abdul.2002. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta:UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah- Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujid. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Trunojoyo
- Hasniwati, Desi. 2009. *Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah*. Skripsi Sarjana
- <http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&id=176>, ditelusuri pada tanggal 8 November Tahun 2009.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS